

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota



SEKRETARIS Daerah Kabupaten Gorontalo Hadijah U Tayeb ketika menerima hasil audit laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja penanganan pandemi Covid-19.

Pemkab Terima Hasil Audit Anggaran Covid-19

LIMBOTO - GP - Pemerintah Kabupaten Gorontalo, menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2020 terkait kinerja anggaran penanganan pandemi Covid-19, Jumat (18/12). LHP ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Hadijah U Tayeb, yang diserahkan, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dwi Sabardiana, di aula kantor BPK, kemarin.

Ditemui usai penerimaan LHP yang digelar di

auditorium BPK Gorontalo, Sekda mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK menjadi acuan pemerintah dalam bekerja, khususnya dalam penanganan Covid-19. "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut," ungkap Hadijah.

Dikatakannya, dalam implementasinya nanti, pihaknya berharap bimbingan BPK agar

pelaksanaan anggaran tepat sasaran, dan hasil audit dapat ditindak lanjuti tepat waktu. Hadijah atas nama pemerintah daerah juga memberikan apresiasinya sekaligus ucapan maafnya jika dalam proses audit hingga penyerahan hasil yang belum sesuai dengan harapan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajarannya yang selalu memberikan bimbingan

arahan kepada kami, semoga kerja sama yang terbina dengan baik selama ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, ucapnya.

Sementara Kepala BPK Dwi Sabardiana dalam sambutannya mengatakan, BPK merespons kebijakan pemerintah dalam menagani wabah pandemi covid-19, dengan melakukan pemeriksaan dalam konteks pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait penanganan covid-19.

"Pemeriksaan yang kami

lakukan dengan tiga jenis pemeriksaan, yakni laporan keuangan, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun pemeriksaan kinerja terkait dengan penanganan pandemi covid-19," ungkap Dwi. Kata dia, pemeriksaan ini layak dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara untuk menyatakan kesimpulan dan memberikan rekomendasi secara memperbaiki tata kelola dalam aspek pemerintahan. (nat)